

## **Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo**

**Dwi Nur Handayani <sup>1</sup>, Alfiyah Agussalim <sup>2</sup>,**

<sup>1</sup>FISIP Universitas Tanjungpura; [dwinurhandayani210192@gmail.com](mailto:dwinurhandayani210192@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Bina Taruna Gorontalo; [alfiyahagussalim.a@gmail.com](mailto:alfiyahagussalim.a@gmail.com)

### **Abstract:**

*Garbage is one of the environmental problems that are often faced by the community. Garbage can damage and pollute the environment so as to interfere with health, comfort, and beauty. Along with the increase in population, the consumption pattern of the community also causing garbage production to increases. The garbage management system, which generally implements a collect-transport-dump system, must be changed with an orientation to sorting garbage from its source (eg households) and it will be more effective in reducing the amount of garbage to be loaded into TPS and TPA. This study aims to analyze the level of community participation in the implementation of garbage management policies in Gorontalo City. The method used in this study is qualitative descriptive. The results showed that the level of community participation in garbage management is still relatively moderate where some communities have participated but in their implementation is still dominated by the government. So the participation of the community in garbage management has not been thorough. As an effort by the government to increase community participation is the establishment of a parent bank sampah in Pulubala Village and TPS 3R.*

**Key Word:** *Public Implementation, Community participation, Waste Management.*

### **Abstrak:**

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering dihadapi masyarakat. Sampah dapat merusak dan mencemari lingkungan sehingga dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula pola konsumsi masyarakat, sehingga menyebabkan produksi sampah kian meningkat. Sistem manajemen sampah yang pada umumnya menerapkan sistem kumpul-angkut-buang harus diubah menjadi pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya (misalnya rumah tangga) dan akan lebih efektif menekan jumlah sampah yang akan dimuat ke TPS dan TPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong sedang, sebagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh pihak pemerintah. Jadi, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah belum menyeluruh. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dibangunnya bank sampah induk di Kelurahan Pulubala dan TPS 3R.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah.

### **1. Pendahuluan**

Program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat terealisasi dengan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi baik pada saat perencanaan maupun saat pelaksanaan program atau kebijakan tersebut, sebab partisipasi publik juga merupakan esensi dari *good governance*. Implementasi suatu kebijakan tentu tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Seperti halnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menuntut peran serta masyarakat. Konteks implementasi kebijakan akan dapat terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut terlaksanakan (Tahir, 2015).

Partisipasi masyarakat juga ditentukan oleh kemauan politik (*political will*) seorang pemimpin, di mana masyarakat diberikan peluang untuk turut berpartisipasi (Mardikanto & Soebiato, 2017). Pejabat yang bertanggungjawab perlu mengikutsertakan masyarakat, bukan saja dalam perencanaan, melainkan hingga pelaksanaan program demi mencapai tujuan masyarakat. Pemerintah Gorontalo telah melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kota Gorontalo melalui sosialisasi, pemasangan poster dan juga media sosial. Namun, sepertinya cara ini belum efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengurangi produksi sampah di Kota Gorontalo. Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2017 bahwa masyarakat turut memiliki andil utama dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan sampah sebab partisipasi masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai upaya untuk mengurangi produksi sampah di Kota Gorontalo.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Adanya tumpukan sampah dapat merusak dan mencemari lingkungan, sehingga dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Seiring dengan bertambahnya pola konsumsi masyarakat produksi sampah setiap hari juga kian meningkat. Sistem pengelolaan sampah yang umumnya digunakan adalah sistem kumpul-angkut-buang. Sementara TPA di Tanjung Keramat yang biasanya menampung sampah dari Kota Gorontalo sudah penuh dan tidak dapat lagi digunakan, sehingga saat ini menggunakan TPA Provinsi untuk menampung sampah dari Kota Gorontalo. Orientasi sistem pengelolaan sampah yang tersentralisasi dengan berbasis pada TPA perlu diubah menjadi terdesentralisasi pada sumber timbulan sampah dengan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai *mainstream* dalam kebijakan pengelolaan sampah

(Saribanon, 2008). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemilahan sampah sejak dari sumbernya (misalnya rumah tangga) akan lebih efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut ke TPS dan TPA. Namun, dalam implementasinya, partisipasi dan efektivitas pengelolaan sampah oleh masyarakat masih belum maksimal. Dilihat dari pemilahan sampah, masyarakat masih banyak yang melakukan pembuangan sampah tanpa mengetahui mana sampah organik dan mana sampah yang anorganik.

Untuk mengurangi produksi sampah, dibutuhkan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sebab apabila sampah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan (Haswindy & Yuliana, 2017). Saat ini pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi produksi sampah salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dan pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas, maka perlu membuat sampah menjadi produk yang berdaya guna sebagai tujuan dari pengelolaan sampah.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjadi acuan pemerintah daerah lainnya di Indonesia untuk lebih giat dalam mengelola dan mengurangi produksi sampah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, ditindak lanjuti dengan membuat aturan turunan berupa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat terealisasi dengan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi, baik pada saat perencanaan, maupun saat pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

Pejabat yang bertanggungjawab perlu mengikutsertakan masyarakat, bukan saja dalam perencanaan, melainkan hingga pelaksanaan program demi mencapai tujuan masyarakat. Pemerintah Gorontalo telah melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kota Gorontalo melalui sosialisasi, pemasangan poster dan juga media sosial. Namun, sepertinya cara ini belum efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengurangi produksi sampah di Kota Gorontalo. Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2017

bahwa masyarakat turut memiliki andil utama dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan sampah sebab partisipasi masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai upaya untuk mengurangi produksi sampah di Kota Gorontalo.

Meningkatnya tumpukan sampah menyebabkan TPA di Tanjung Keramat yang biasanya menampung sampah dari Kota Gorontalo sudah penuh dan tidak dapat lagi digunakan, sehingga terpaksa menggunakan TPA Provinsi yang berlokasi di Kelurahan Talumelito untuk menampung sampah dari Kota Gorontalo. TPA Talumelito sendiri harus menampung sampah dari wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Kota Gorontalo menjadi penyumbang sampah terbesar di TPA Talumelito yang mencapai 80%. Sementara Kabupaten Gorontalo sebesar 15 % dan Kabupaten Bone Bolango 5% (Alex, 2019). Metode pengelolaan sampah yang hanya berorientasi pada TPA harus diubah dengan berfokus pada sumber timbulan sampah, sehingga menuntut peran serta masyarakat sebagai poin utama dalam kebijakan pengelolaan sampah (Saribanon et al., 2009). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah demi menjamin terkelolanya sampah, yaitu setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi sampah melalui pembatasan timbulan sampah, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah (Pratiwi et al., 2017). Pemilahan sampah sejak dari sumbernya (misalnya rumah tangga) akan lebih efektif untuk menekan jumlah sampah yang akan dimuat ke TPS dan TPA. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

## **2. Hasil Penelitian**

Implementasi suatu kebijakan tentu tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Seperti halnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menuntut peran serta masyarakat. Konteks implementasi kebijakan akan dapat terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut terlaksanakan (Tahir, 2015). Partisipasi masyarakat dapat menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan atau program dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui pemberian usul atau saran dan realisasi program pengelolaan sampah, serta dilaksanakan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, Kota Gorontalo memiliki bank sampah induk di Kecamatan Kota Tengah Kelurahan Pulubala dan TPS 3R sebagai penyangga bank sampah induk yang ada di Kelurahan Wongkaditi, Kelurahan Moodu, Kelurahan Pulubala, Kelurahan Donggala, Kelurahan Tuladenggi, Kelurahan Buladu. Pengelolaan bank sampah dan TPS 3R dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang penting untuk diidentifikasi dalam aksi pengelolaan sampah (Asteria & Heruman, 2016).

Bank sampah berfungsi sebagai tempat menabung sampah yang telah dipilah menurut jenis sampah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomis disetor pada bank sampah. Secara umum, mekanisme bank sampah hampir sama dengan bank lainnya. Memiliki manajemen tata kelola, ada nasabah, serta inventarisasi. Jika pada bank, nasabah melakukan penyetoran dalam bentuk uang. Namun, pada bank sampah yang diserahkan yaitu sampah yang memiliki nilai ekonomis. Output nyata dari bank sampah dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan tabungan sebagai bentuk investasi (Mappasere & Husein, 2019).

Partisipasi masyarakat di Kota Gorontalo dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari tiga bentuk partisipasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eriscon dalam (Slamet, 2014) bahwa partisipasi masyarakat terbagi menjadi 3 (tiga), yakni partisipasi pada fase perencanaan, partisipasi pada tahap pelaksanaan, dan partisipasi pada tahap pemanfaatan. Berikut uraian dari ketiga fase tersebut.

### *2.1 Partisipasi masyarakat pada fase perencanaan*

Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pengelolaan sampah maupun program bank sampah dan TPS 3R melibatkan masyarakat melalui forum-forum public, baik secara formal maupun informal yang diadakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup guna menyaring aspirasi dari masyarakat. Mekanisme formal dilakukan dengan mengundang elemen masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir di setiap rapat atau sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dan kebutuhannya. Berangkat dari pemahaman Davis dan Erickson (Mulyadi & Gedeona, 2017), maka hal yang dapat kita ambil dari konsep partisipasi yang disampaikan ialah partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hak yang dimiliki individu untuk terlibat aktif dan spontan, turut berkontribusi dan bertanggung jawab pada semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai nantinya menikmati hasil pembangunan tersebut.

Adapun mekanisme informal yang dilakukan oleh kepala bidang pengelolaan limbah domestik Dinas Lingkungan Hidup, yaitu dengan berkunjung ke berbagai TPS 3R yang ada di Kota Gorontalo mendiskusikan dengan masyarakat mengenai berbagai perkembangan dan masalah pengelolaan sampah. Demikian juga untuk menjelaskan ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana masyarakat menilai arti penting keterlibatan mereka dan dianggap penting oleh pemerintah dalam proses pembangunan. Aspek inilah yang menjadi motif utama yang mendorong kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, aspek ini menjadi landasan awal untuk menjelaskan peran serta masyarakat terhadap perencanaan program pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

Aspek tersebut menjadi motif utama yang mendorong kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, juga menjadi landasan awal untuk menjelaskan peran serta masyarakat terhadap perencanaan program pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

## 2.2 *Partisipasi pada tahap pelaksanaan*

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan melalui organisasi bentukan pemerintah yang sudah ada dan kesadaran dari entitas masyarakat di Kota Gorontalo. Keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi atau penyuluhan, dalam proses sosialisasi masyarakat dikumpulkan untuk diberikan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah,

mengumpulkan sampah dan memilah sampah. Sosialisasi terkait pengelolaan sampah sebagai langkah untuk meningkatkan peran serta masyarakat, melalui sosialisasi atau penyuluhan dapat membentuk kesadaran dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah, meskipun sebagian masyarakat masih mengeluhkan tidak memperoleh informasi terkait pelaksanaan sosialisasi. Di sisi lain, ketika Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi, tetapi sebagian masyarakat bersifat acuh dalam mengelola, mengumpulkan, memilah, dan menabung sampahnya.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan juga terlihat dari keterlibatan masyarakat sebagai nasabah di bank sampah dengan jumlah nasabah sekitar 200-300 orang melalui sistem *cash and caring*. Kegiatan nasabah terkait dengan partisipasinya, yaitu masyarakat mengumpulkan sampahnya kemudian ditimbang di bank sampah. Hasil dari penimbangan sampah tersebut dikonversikan dalam bentuk tabungan. Begitu juga, pemanfaatan TPS 3R masyarakat hanya menelpon petugas TPS 3R untuk menjemput sampah yang telah dikumpulkan. Bank sampah berfungsi sebagai tempat menabung sampah yang telah dipilah menurut jenis sampah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomis disetor pada bank sampah. Secara umum, mekanisme bank sampah hampir sama dengan bank lainnya. Memiliki manajemen tata kelola, ada nasabah, serta inventarisasi. Jika pada bank, nasabah melakukan penyetoran dalam bentuk uang. Namun, pada bank sampah yang diserahkan, yaitu sampah yang memiliki nilai ekonomis. Output nyata dari bank sampah dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan tabungan sebagai bentuk investasi (Mappasere & Husein, 2019). Selain itu, masyarakat yang rumahnya berada di dekat TPS 3R langsung membawa sendiri sampahnya ke TPS 3R. Sampah yang dibawa oleh masyarakat ada yang sudah dipilah ada juga belum terpilah, sehingga sampah yang belum terpilah setelah sampai di TPS 3R dipilah kembali oleh petugas TPS 3R.

Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, Kota Gorontalo memiliki bank sampah induk di Kecamatan Kota Tengah Kelurahan Pulubala dan TPS 3R sebagai penyangga bank sampah induk yang ada di Kelurahan Wongkaditi, Kelurahan Moodu, Kelurahan Pulubala, Kelurahan Donggala, Kelurahan Tuladenggi, Kelurahan Buladu. Pengelolaan bank sampah dan TPS 3R dilakukan

dengan metode partisipatif, yaitu masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang penting untuk diidentifikasi dalam aksi pengelolaan sampah (Asteria & Heruman, 2016).

Biasanya sampah yang banyak dipilah oleh masyarakat yaitu sampah botol, kardus, dan sisa makanan. Ada masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengolahan sampah, ada juga masyarakat yang melakukan pemilahan tetapi tidak mengolah sampah. Selain masyarakat yang melakukan pemilahan sampah, tetapi tidak melakukan pengolahan sampah, ada juga masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah dan tidak mengolah sampah dengan alasan sibuk dan tidak mengetahui jenis sampah organik dan anorganik. Di samping itu, sistem pengangkutan sampah belum ditunjang dengan metode pengangkutan sampah terpisah, sehingga terkadang masyarakat merasa percuma memisahkan sampahnya karena pada akhirnya akan bergabung kembali ketika diangkut ke TPA. Pengadaan tempat sampah organik dan anorganik dari pihak pemerintah masih kurang memadai di Kota Gorontalo. Jadi, bagi masyarakat yang memilah sampah di rumahnya menyediakan sendiri tempat sampah.

### 2.3 *Peran serta pada aspek pemanfaatan*

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan wadah yang telah dibangun oleh pemerintah yaitu melalui salah satu TPS 3R di Kelurahan Donggala yang dijadikan sebagai rumah kreatif. Sampah yang dibawa oleh masyarakat dipilah kemudian didaur ulang pada rumah kreatif tersebut. Hasil daur ulang tersebut, antara lain berupa lemari, kursi, hiasan dinding, bunga hias, dan berbagai macam produk kreatif yang indah dan berdaya guna kembali. Secara mandiri meski hanya sebatas mengisi waktu, adapula sebagian masyarakat mendaur ulang kembali sampahnya di rumah. Kemudian, hasil dari daur ulang tersebut dipajang di rumah kreatif dan hasil dari penjualan kreativitas masyarakat sebagian masuk ke kas TPS 3R. Selain itu, inisiatif membuat warkop 3R di TPS 3R Kelurahan Donggala, di mana dua kilogram sampah plastik akan ditukar dengan satu gelas kopi. Padal bank sampah yang ada di Kelurahan Pulubala juga dijadikan sebagai tempat edukasi.

Melalui TPS 3R masyarakat diberi pelatihan pengomposan. Meskipun, pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih sangat terbatas, biasanya sampah yang berupa sisa makanan didaur ulang menjadi kompos yang



digunakan secara pribadi sebagai pupuk tanaman. Adanya program-program yang dibuat oleh pemerintah memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi yang berlandaskan pada aspirasi tingkat bawah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sebagai proses dalam pengambilan keputusan tentang program atau kebijakan karena masyarakat mempunyai hak untuk menikmati dari hasil pembangunan.

Pada konteks partisipasi masyarakat, masyarakat memiliki kedudukan yang penting. Hal itu dijelaskan oleh adanya pilihan pendekatan peran serta masyarakat agar terlibat dalam pengelolaan sampah dan adanya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan sampah, meski belum menjadi suatu kebiasaan semua warga masyarakat. Adanya keterbatasan anggaran dan sarana prasarana persampahan yang belum memadai, sehingga potensi masyarakat benar-benar didayagunakan. Terlebih lagi sebagian masyarakat masih bersifat acuh dalam memilah sampah untuk dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Selain itu, kesadaran masyarakat pun masih kurang untuk menempatkan sampahnya pada tempat yang telah disediakan. Adanya fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa derajat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Sementara itu, pemisahan sampah sejak dari awal timbulan sampah, misalnya pada level rumah tangga adalah salah satu cara yang dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen pengelolaan sampah pada tahapan selanjutnya.

Program bank sampah dan TPS 3R di Kota Gorontalo telah dirasakan bagi masyarakat, meskipun belum menyeluruh. Sampah yang sebelumnya tidak menjadi perhatian, sekarang tampak adanya upaya menjadikannya sesuatu yang bernilai ekonomis. Perubahan pola pikir dari masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah, dari sistem kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan yang berfokus pada aktivitas pengurangan timbulan sampah, mendaur ulang, serta memanfaatkan ulang sampah. Kegiatan tersebut terkenal dengan istilah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R).

Keberadaan wadah-wadah tersebut merupakan upaya yang ada di Kota Gorontalo untuk memberikan peluang yang luas bagi masyarakat turut berperan serta dalam pengelolaan sampah. Keberadaan bank sampah pun harus bersinergi dengan TPS 3R sebagai penopang bank sampah karena bank sampah tidak dapat berdiri sendiri. Adanya kesadaran tersebut dapat terlihat dari segi manfaat, baik nilai ekonomi, maupun nilai kebermanfaatan dalam menciptakan lingkungan yang

hijau, bersih, dan sehat. Jadi, keberadaan wadah-wadah tersebut selain dapat memberikan nilai ekonomis, juga dapat memberi nilai tambah terhadap lingkungan. Namun, sebagian besar masyarakat masih bersifat acuh, belum bisa memilah sampah yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih kurang untuk menempatkan sampahnya pada tempat yang telah disediakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Sementara itu, pemisahan sampah sejak dari awal timbulan sampah pada level rumah tangga, sebagai salah satu cara yang dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen pengelolaan sampah pada tahapan selanjutnya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, yaitu menjalin kemitraan dalam pengelolaan sampah bersama pihak pegadaian, PLN, dan perhotelan. Sebagaimana Perda Kota Gorontalo No.12 Tahun 2017 mengatur pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara bermitra dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, pemerintah berorientasi kepada kegiatan pemberdayaan, yakni dengan berusaha memudahkan masyarakat supaya dapat hidup tidak sepenuhnya senantiasa bergantung kepada pemerintah. Hasilnya, masyarakat mampu menunjukkan tingkat partisipasinya yang tinggi (Mulyadi & Gedeona, 2017). Tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong sedang, di mana masyarakat telah turut berperan serta dalam pengelolaan sampah, akan tetapi lebih didominasi oleh pihak pemerintah. Masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo dalam implementasinya belum menyeluruh, sebagian besar masyarakat masih tidak menyadari bahwa pentingnya peran serta mereka dalam pengelolaan sampah.

### **3. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong sedang, sebagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh pihak pemerintah. Jadi, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah belum menyeluruh. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dibangunnya bank sampah induk di Kelurahan Pulubala dan TPS 3R.

## Refrensi

- Alex. (2019). *Produksi Sampah Dari 3 Daerah Ini Bikin TPA Talumelito Nyaris Penuh*. Hulondalo.Id.
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 136.
- Haswindy, S., & Yuliana, F. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 96.
- Mappasere, F. A., & Husein, N. (2019). Ibm Gerakan Bank Sampah Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kota Makasar. *Majalah Aplikasi NGAYAH*, 10(1), 84.
- Mulyadi, D., & Gedeona, H. (2017). *Demokrasi, Governance, Dan Ruang Publik Dalam Kajian Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Pratiwi, F. A., Soemirat, J., & Ainun, S. (2017). Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sukaluyu. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 2(1), 1–12.
- Saribanon, N., Soetarto, E., Sutjahjo, S. H., Sai'id, E. G., & Sumardjo. (2009). Perencanaan Sosial Dalam Pengelolaan Sampah Permukiman Berbasis Masyarakat Di Kotamadya Jakarta Timur. *Forum Pascasarjana*, 32(2), 143–152.
- Slamet. (2014). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta,Bandung.